

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi lingkungan dewasa ini menjadi isu yang sangat diperdebatkan, karena semakin hari udara, persediaan air bersih, dan komposisi tanah kualitasnya semakin buruk. *Global warming*, efek rumah kaca, hujan asam, dan bencana lingkungan lainnya merupakan contoh dari akibat buruknya perlakuan kita terhadap alam sehingga bencana tersebut setiap saat bisa saja "menghantui" kita.

Lumpur Panas Lapindo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 hingga kini merupakan bukti nyata bencana lingkungan yang terjadi akibat keserakahan korporasi dalam mengambil sumber daya alam tanpa memperhatikan dan memperbaiki keadaan lingkungan sekitar. Kasus lainnya yang terjadi adalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Buyat, Minahasa Selatan yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya (WALHI, 2010). PT. Freeport Indonesia juga menyumbang pencemaran dan perusakan lingkungan di Sungai Ajkwa yang merupakan media pembuangan *tailing* yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya). (www.csrindonesia.com, 2008).

Kasus-kasus tersebut merupakan contoh dari sebagian kecil kasus yang menyebabkan kerusakan, dan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Kasus tersebut terjadi karena perusahaan tidak menerapkan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik), sehingga perusahaan kurang melakukan *control*/pengendalian terhadap aktivitas perusahaan tersebut.

Seharusnya praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007). Menurut Said *et.al.* (2009) *Corporate Governance* sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan terhadap para *stakeholder*. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009).

Menurut Khaihatu (2006) dikutip dalam Waryanto (2010) mekanisme GCG akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders*. Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan GCG harus didukung dengan struktur *corporate governance* terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *good governance* seperti sekretaris perusahaan, komite audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan GCG.

Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Selain adanya dewan komisaris yang memiliki peran dalam pengungkapan tanggung jawab secara sukarela adalah kepemilikan. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yaitu perusahaan dengan kepemilikan institusi dan asing yang tinggi akan memiliki tekanan lebih tinggi untuk mengungkapkan aktivitasnya dengan alasan untuk memasarkan sahamnya (Rosmasita, 2007).

Dewasa ini perusahaan berlomba mengedepankan *sustainability development* / pembangunan yang berkelanjutan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga dapat menjaga keseimbangan alam. *Sustainable development* kini sudah mulai dikenal di negara-negara berkembang seperti Indonesia. *Sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dunia sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. (*Commission on Environment and Development* dalam GRI, 2006).

Berdasarkan *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 menghasilkan perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan/*sustainability development*. Ada lima faktor yang membuat konsep keberlanjutan menjadi sesuatu yang penting, yaitu ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggungjawab sosial, implementasi dalam kebijakan, dan mempunyai nilai manfaat.

Untuk mencapai *sustainability development* diperlukan sebuah kerangka global dengan bahasa yang konsisten dan dapat diukur dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan

laporan keberlanjutan (*sustainability report* (SR)) (Suryono dan Prastiwi, 2011). Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan bentuk laporan yang bersifat sukarela (*voluntary*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Isu mengenai *sustainable development* berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*. *The Global Reporting Initiative* (GRI) yang berlokasi di Belanda dan pemegang otoritas lain di dunia, berusaha mengembangkan “*framework for sustainability reporting*”, dan versi terakhir dari pedoman pelaporan yang telah dihasilkan dinamakan *G3 Guidelines* (Dilling, 2009).

Di Indonesia, *sustainability report* masih bersifat *voluntary* dan dalam tahap pengenalan dimana masih sedikit perusahaan yang tertarik untuk mengungkapkan *sustainability report* (Suyono dalam Idah, 2013). Walaupun setiap tahun jumlah perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* semakin bertambah, namun tidak sebanding dengan jumlah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Seperti yang dikutip dari web (<http://isra.ncsr-id.org>) Perusahaan *go public* yang melakukan pengungkapan *sustainability report* sampai diadakan ISRA (*Indonesia Sustainability Report Awards*) pada tahun 2012 hanya 31 perusahaan atau setara dengan 7,35% dari total perusahaan yang listed di BEI. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran perusahaan mengenai manfaat dari pengungkapan *sustainability report*.

Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran atas pengungkapan laporan yang berkelanjutan semakin tinggi. Sehingga terjadi perubahan paradigma dalam

dunia usaha, yang selama ini berasal dari *profit oriented only*, kemudian menjadi berorientasi pada *sustainability report disclosure* yang memiliki tiga hal yang sering disebut dengan *Tripple-P Bottom Line* (Suryono dan Prastiwi, 2011). Beralihnya orientasi kepada ketiga hal tersebut merupakan usaha yang digunakan oleh manajer perusahaan untuk mencapai *sustainability development*, melalui aktivitas-aktivitas operasi yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keuntungan (*profit*), bumi (*planet*), dan komunitas (*people*) (Elkington dalam Nugroho, 2009).

Dengan *profit*, perusahaan dapat tetap *going concern*. Namun dalam kenyataannya, saat ini perusahaan tidak dapat *going concern* hanya dengan mengedepankan *profit* saja, namun juga *people* dan *planet*. Hal ini disebabkan *people* dan *planet* juga terlibat dalam proses dan dampak atas aktivitas perusahaan yang sering dilalaikan oleh perusahaan. (Adhipradana, 2013).

Perusahaan memerlukan *people* baik investor, karyawan, *supplier*, konsumen, masyarakat, maupun lembaga masyarakat. Perusahaan memerlukan investor untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Untuk menarik para investor, perusahaan harus dapat memenuhi keinginan investor dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi agar para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan.

Perusahaan juga harus memperhatikan *planet* (lingkungan), terutama perusahaan manufaktur. Hal ini disebabkan perusahaan dapat beroperasi dengan mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Beberapa tahun ini terdapat banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, mulai dari pencemaran

lingkungan maupun eksploitasi sumber daya alam besar-besaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perhatian perusahaan terhadap lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama untuk menjaga keseimbangan alam.

Atas dasar itulah perusahaan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas sosial dalam rangka menanggapi isu-isu sosial dan lingkungan yang beredar di masyarakat. Setelah perusahaan melakukan berbagai aktivitas tersebut, perusahaan perlu untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*. Menurut GRI (Global Reporting Initiative) *sustainability report* adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Saat ini, mekanisme pelaporan keberlanjutan mempunyai beragam fungsi. Bagi perusahaan, laporan keberlanjutan dapat berfungsi sebagai alat ukur pencapaian target kerja dalam isu *Triple Bottom Line* (TBL). Bagi investor, laporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat kontrol atas capaian kinerja perusahaan sekaligus sebagai media pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumber daya finansialnya terutama dalam lingkup *sustainable and responsible investment* (SRI). Sementara bagi pemangku kepentingan lainnya (media, pemerintah, konsumen, akademis dan lain-lain) laporan keberlanjutan menjadi tolok ukur untuk menilai kesungguhan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Adhima, 2013).

Perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* ingin menunjukkan komitmen perusahaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan kepada *stakeholder* serta menunjukkan transparansi dan mendapatkan umpan balik pada kinerja perusahaan dalam menanggapi tuntutan informasi dari *stakeholder* (Adhipradana, 2013). Dengan *sustainability report*, perusahaan dapat meningkatkan atau melindungi *image* perusahaan dan membangun serta memelihara hubungan perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Dengan adanya *sustainability report* juga dapat dilihat kinerja dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat digunakan para investor untuk mempertimbangkan apakah tepat untuk melakukan investasi dengan menilai kinerja suatu perusahaan tidak hanya dengan *annual report* saja, namun juga dapat dilihat dari *sustainability report* perusahaan (Adhipradana, 2013).

Penelitian mengenai *sustainability report* juga mulai berkembang, yang menandakan fenomena *sustainability report* mulai banyak dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan informasi praktik sosial lingkungan dan standar pelaporan *sustainability report* yang berkualitas terus diteliti dalam berbagai studi empiris. Dilling (2009) meneliti adakah perbedaan antara perusahaan yang telah menerbitkan *sustainability report* dengan yang tidak, bila dilihat dari karakteristik-karakteristik perusahaan (jenis sektor operasi, kinerja keuangan, pertumbuhan jangka panjang, *corporate governance*, maupun lokasi perusahaan-perusahaan tersebut didirikan). Suryono dan Prastiwi (2011) juga menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *sustainability report* dan menemukan adanya pengaruh profitabilitas, dan jumlah rapat komite audit terhadap praktik pengungkapan

sustainability report. Berbeda dengan hasil penelitian Luthfia (2012) yang menemukan tidak adanya pengaruh profitabilitas dan rapat komite audit terhadap publikasi *sustainability report*. Disamping itu, Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan tidak adanya pengaruh *leverage* dan *governance committee* dalam praktik pengungkapan SR. Berbeda dengan Luthfia (2012) yang menemukan adanya pengaruh *leverage* dan *governance committee* terhadap publikasi SR. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Almilia (2008) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif terhadap *Internet Financial and Sustainability Reporting*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2010) menemukan tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan CSR dalam *sustainability report*.

Adanya hasil temuan yang tidak konsisten dari beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Sustainability Reporting Disclosure yang dipengaruhi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajemen, Likuiditas, dan Aktivitas Operasi dengan acuan penelitian yang dilakukan oleh Dilling, (2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut terlihat bahwa *good corporate governance* dan kinerja perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Salah satu prinsip *good corporate governance* adalah akuntabilitas dan keterbukaan. Kedua hal ini lah yang memiliki sumbangsiah besar dalam mendorong pengungkapan *sustainability report*. Akuntabilitas perusahaan dapat dilihat dari bagaimana peran dewan komisaris dalam melakukan pengawasan.

Dengan adanya dewan komisaris akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan. Kemudian prinsip keterbukaan atau *transparency* dapat ditentukan oleh seberapa besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan tersebut. Semakin besar tingkat kepemilikan manajemen maka manajemen akan berupaya untuk memberikan atau mengungkapkan informasi yang terdapat dalam laporan perusahaan dengan alasan untuk meningkatkan nilai saham perusahaan, sesuai dengan yang dikatakan Rosmarita, 2007 dalam Nurrahman, 2013 mengenai prinsip transparansi yaitu perusahaan dengan kepemilikan institusi dan asing yang tinggi akan memiliki tekanan lebih tinggi untuk mengungkapkan aktivitasnya dengan alasan untuk memasarkan sahamnya.

Kinerja perusahaan juga merupakan hal yang menentukan dalam pengungkapan *sustainability reporting*. Masalahnya biaya yang diperlukan untuk membuat *sustainability reporting* tidaklah sedikit sehingga membutuhkan kas yang besar. Oleh karena itu sejauh mana perusahaan menghasilkan kas dapat dilihat dari aktivitas perusahaannya dan ditentukan juga apakah perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang baik. Ke-dua komponen dari kinerja perusahaan ini lah yang menentukan luasnya *sustainability reporting disclosure*.

Berdasarkan hal tersebut maka, penulis melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajemen, Likuiditas dan Aktivitas Operasi terhadap *Sustainability Reporting Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012)".**

B. Identifikasi Masalah

1. Perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia cenderung belum memahami dan melaksanakan konsep *sustainability development*, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.
2. Tingkat partisipasi perusahaan *go public* yang mengungkapkan dan mempublikasikan *sustainability reporting* masih kecil.
3. *Good Corporate Governance* pada perusahaan tidak berjalan dengan baik sehingga prinsip-prinsip corporate governance yaitu keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan dan kewajaran tidak sepenuhnya diterapkan.
4. Diperlukannya dana atau kas yang besar bagi perusahaan untuk membuat *sustainability report* sehingga kinerja perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas operasi harus tinggi.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada terlihat banyak faktor yang mempengaruhi *sustainability reporting disclosure*. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian dibatasi hanya pada perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012 yang mengeluarkan dan mempublikasikan *sustainability report* dengan variable dependen yaitu *sustainability reporting disclosure* serta variable independen menggunakan dewan komisaris independen, kepemilikan manajemen, likuiditas, dan aktivitas operasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang ada, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah variable dewan komisaris independen yang diukur dengan persentase dewan komisaris independen (DKI) berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*?
2. Apakah variable kepemilikan manajemen yang diukur dengan jumlah kepemilikan manajemen (KP) berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*?
3. Apakah variable likuiditas yang diukur dengan rasio lancar (CR) berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*?
4. Apakah variable aktivitas operasi yang diukur dengan arus kas dari operasi dibagi dengan total asset (AO) berpengaruh terhadap *sustainability reporting disclosure*?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan di bidang pengungkapan laporan yang berkelanjutan (*Sustainability Reporting Disclosure*)

Bagi fakultas penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian lain yang akan mengajukan dengan judul atau variabel yang serupa. Dan juga memperkaya penelitian dibidang keuangan dan auditing.

2. Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan dan praktisi penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk berhati-hati serta menggunakan prinsip yang berlaku umum dalam membuat laporan keuangan serta pengungkapan laporan yang berkelanjutan (*Sustainability Reporting Disclosure*).

Bagi penulis penelitian ini memperdalam ilmu keuangan dan auditing yang telah dipelajari selama empat tahun kuliah di fakultas ekonomi Universitas Negeri Jakarta jurusan akuntansi.